

Tata Kelola Administrasi Desa

Langkah-langkah Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik

Tata kelola administrasi desa yang baik merupakan hal yang penting demi mencapai tujuan pemerintahan pada tingkat desa. Hal ini dikarenakan tata kelola administrasi yang baik memiliki sejumlah dampak positif bagi desa, mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan publik sampai dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Melihat pentingnya tata kelola administrasi desa, sehingga perlu pemahaman yang baik terkait dengan langkah-langkah menuju pemerintahan yang lebih baik.

Sebelum melangkah lebih jauh, tahap awal yang penting menuju pemerintahan yang baik adalah melakukan evaluasi terhadap administrasi desa serta memahami transparansi dan akuntabilitas dari administrasi desa. Transparansi dan akuntabilitas yang kuat adalah landasan yang penting dalam memastikan pemerintahan desa yang lebih baik. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kapasitas pegawai administrasi desa adalah salah satu pilar utama tata kelola administrasi desa yang baik. Pegawai administrasi desa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada era digital seperti saat ini, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik pada tingkat desa terutama berkaitan dengan tata kelola administrasinya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government merupakan pendorong utama efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik di seluruh dunia. Namun, penerapan dari e-government di desa ini tentunya memerlukan pengetahuan dan langkah yang tepat serta hal-hal eksternal lainnya seperti infrastruktur, pengembangan aplikasi, pelatihan pegawai, dan sebagainya



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEHAKSIAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI
EC002023106463

ISBN 978-623-151-692-3



9 786231 516923

TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA : LANGKAH-LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A.

Rifaldy Adinandra Ferdiansyah

Tri Febrianti



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA : LANGKAH-
LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK**

Penulis : Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A.
Rifaldy Adinandra Ferdiansyah
Tri Febrianti

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nur Aisah

ISBN : 978-623-151-692-3

No. HKI : EC002023106463

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul Tata Kelola Administrasi Desa Langkah-langkah Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca dalam memahami bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam buku ini, dijelaskan terkait Tata kelola administrasi desa yang baik, merupakan hal yang penting demi mencapai tujuan pemerintahan pada tingkat desa. Hal ini dikarenakan tata kelola administrasi yang baik memiliki sejumlah dampak positif bagi desa, mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan publik sampai dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Melihat pentingnya tata kelola administrasi desa, sehingga perlu pemahaman yang baik terkait dengan langkah-langkah menuju pemerintahan yang lebih baik.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang tata kelola pemerintah daerah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Malang, 1 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGENALAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA.....	1
A. Definisi Tata Kelola Administrasi Desa	1
B. Pentingnya Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik ..	4
BAB 2 EVALUASI AWAL ADMINISTRASI DESA	8
A. Analisis Status Quo.....	8
B. Identifikasi Kebutuhan Perubahan	11
BAB 3 MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	14
A. Keterbukaan Informasi.....	14
B. Akuntabilitas Administrasi Desa	17
BAB 4 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN	21
A. Pentingnya Partisipasi Masyarakat	21
B. Strategi untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat	24
C. Melibatkan Berbagai Kelompok Masyarakat	27
BAB 5 PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI ADMINISTRASI DESA	30
A. Pelatihan dan Pengembangan	30
B. Penggunaan Teknologi.....	32
BAB 6 PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM ADMINISTRASI DESA	36
A. <i>E-Government</i> dan Digitalisasi.....	36
B. Pelayanan Publik <i>Online</i>	41
BAB 7 MONITORING DAN EVALUASI PERUBAHAN	44
A. Pengukuran Kinerja Administrasi Desa	44
B. Perbaikan Berkelanjutan.....	47
BAB 8 TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA.....	50
A. Kendala Umum.....	50
B. Strategi Mengatasi Tantangan	53

BAB 9 KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA.....	56
A. Poin-poin Kunci.....	56
B. Langkah Selanjutnya.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	64
TENTANG PENULIS.....	67

BAB 1

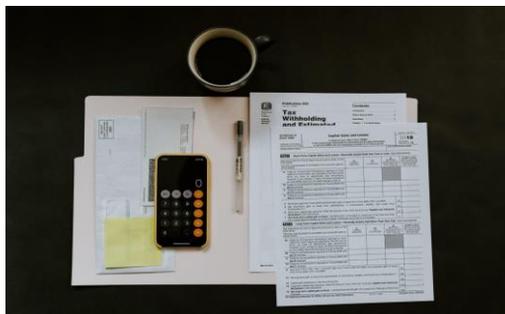
PENGENALAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA

A. Definisi Tata Kelola Administrasi Desa

Pada bab pertama ini, kita akan memasuki dunia tata kelola administrasi desa, sebuah konsep yang menjadi pondasi utama dalam perjalanan menuju pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa. Untuk memahami konsep ini dengan baik, mari kita eksplorasi lebih dalam definisi tata kelola administrasi desa, konsep dasar yang melandasi tata kelola ini, dan peran yang sangat penting dari administrasi desa dalam konteks pemerintahan lokal yang lebih besar.

1. Konsep Dasar Tata Kelola

Tata kelola adalah istilah yang sering kali terdengar dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata kelola administrasi desa? Untuk memahaminya dengan baik, mari kita mulai dengan menguraikan konsep dasar dari tata kelola ini.



BAB 2

EVALUASI AWAL ADMINISTRASI DESA

Dalam bab ini, kita akan memulai perjalanan menuju pemerintahan desa yang lebih baik dengan melakukan evaluasi awal terhadap administrasi desa. Tahapan ini sangat penting karena memberikan landasan yang kuat untuk perubahan yang akan kita lakukan. Evaluasi awal akan terdiri dari dua bagian utama: analisis status quo dan identifikasi kebutuhan perubahan.

A. Analisis Status Quo

Sebelum kita dapat memulai perubahan yang signifikan dalam administrasi desa, langkah pertama adalah memahami keadaan saat ini. Dalam sub-bab ini, kita akan melakukan analisis menyeluruh terhadap status quo administrasi desa, yang mencakup dua aspek utama: struktur dan prosedur administrasi desa serta kualitas pelayanan publik yang saat ini disediakan.

BAB 3

MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Bab ini akan membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai konteks, mulai dari pemerintah hingga bisnis dan organisasi nirlaba. Kami akan menjelaskan mengapa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas.

A. Keterbukaan Informasi



Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dari tata kelola yang baik. Ini melibatkan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang bagaimana administrasi desa beroperasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sumber daya digunakan. Dalam sub-bab ini, kita akan

BAB 4

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah salah satu pilar utama tata kelola administrasi desa yang baik. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya partisipasi masyarakat, strategi untuk mendorong partisipasi aktif, dan bagaimana melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

A. Pentingnya Partisipasi Masyarakat



Partisipasi masyarakat adalah prinsip fundamental dalam tata kelola administrasi desa yang baik. Ini tidak hanya merupakan aspek penting dalam membangun pemerintahan

BAB 5

PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI ADMINISTRASI DESA

Peningkatan kapasitas pegawai administrasi desa adalah langkah penting dalam mengembangkan pemerintahan desa yang lebih baik. Dalam bab ini, kita akan membahas berbagai aspek peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan dan pengembangan serta penggunaan teknologi.

A. Pelatihan dan Pengembangan



Pegawai administrasi desa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan adalah langkah penting dalam peningkatan kapasitas pegawai desa.

BAB 6

PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM ADMINISTRASI DESA

Penerapan teknologi dalam administrasi desa adalah sebuah evolusi yang signifikan dalam cara desa-desa beroperasi. Teknologi telah membawa dampak besar di berbagai bidang, dan administrasi desa bukan pengecualian. Bab ini akan mengulas berbagai aspek penting terkait dengan penerapan teknologi dalam administrasi desa, dengan fokus pada peran e-government dan inisiatif berbasis teknologi dalam meningkatkan layanan publik serta kehidupan masyarakat desa.

A. *E-Government* dan Digitalisasi

Penerapan teknologi dalam administrasi publik telah membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. *E-Government*, atau pemerintahan elektronik, adalah salah satu aspek utama dari transformasi ini. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi konsep *E-Government*, langkah-langkah menuju implementasinya, serta pentingnya keamanan data dan privasi dalam administrasi publik yang semakin terdigitalisasi.

BAB 7

MONITORING DAN EVALUASI PERUBAHAN

Bab ini akan membahas pentingnya memonitor dan mengevaluasi perubahan yang telah diterapkan dalam administrasi desa. Monitoring dan evaluasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan.

A. Pengukuran Kinerja Administrasi Desa

Pengukuran kinerja administrasi desa adalah fondasi utama dalam memastikan bahwa pemerintah desa beroperasi dengan efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mereka layani. Dalam konteks ini, bab ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana menentukan indikator kinerja yang relevan dan bagaimana melaksanakan pengumpulan serta analisis data untuk mengukur kinerja administrasi desa.



BAB 8

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA

Bab ini akan membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh administrasi desa saat mereka berusaha untuk mengimplementasikan tata kelola administrasi desa yang lebih baik. Meskipun perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik adalah tujuan yang mulia, prosesnya tidak selalu mulus dan sering kali dihadapi dengan berbagai kendala dan hambatan.

A. Kendala Umum

Dalam perjalanan menuju tata kelola administrasi desa yang lebih baik, ada sejumlah kendala umum yang sering dihadapi oleh administrasi desa. Dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah hambatan organisasi dan tantangan sosial serta budaya.

1. Hambatan Organisasi

Kurangnya Rencana Strategis: Salah satu hambatan utama dalam administrasi desa adalah kurangnya rencana strategis yang jelas. Tanpa rencana yang baik, desa mungkin kesulitan untuk mengarahkan upaya mereka menuju perubahan yang diinginkan. Rencana strategis adalah alat yang sangat penting dalam merumuskan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien (Nahak & Ellitan, 2023). Tanpa rencana yang kuat, desa mungkin terombang-ambing dalam menghadapi tantangan yang muncul.

BAB 9

KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA

Bab terakhir buku ini mencerminkan titik akhir dari perjalanan kita dalam menjelajahi tata kelola administrasi desa yang lebih baik. Sebagai panduan praktis, buku ini telah menguraikan konsep, strategi, dan langkah-langkah yang dapat membantu desa mencapai pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif. Mari kita tinjau poin-poin kunci yang telah kita pelajari.

A. Poin-poin Kunci

Dalam buku ini, telah kita bahas berbagai aspek penting yang terkait dengan tata kelola administrasi desa yang lebih baik. Di bagian ini, kami akan merangkum beberapa poin kunci yang perlu diingat dalam upaya meningkatkan administrasi desa.

1. Menggugah Semangat Reformasi Administrasi Desa

Salah satu poin kunci yang telah dibahas dalam buku ini adalah pentingnya menggugah semangat reformasi dalam administrasi desa. Reformasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk menciptakan perubahan positif. Reformasi administrasi desa mengacu pada upaya untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan semangat reformasi yang kuat, desa dapat mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. A. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di pemerintah Kota Tasikmalaya (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Hayat, M. A. M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya Alam desa. *Justisia*, hal, 361-375.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaawoan, J. E. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.

- Nahak, M., & Ellitan, L. (2023). Peran Perencanaan Strategik dan Kepemimpinan Strategik dalam Membangun Kinerja Organisasi Publik. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 3986-3999.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 204-212.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13-24.
- Permana, D., Nurulsyam S, A., & Anggoro, T. (2022). Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis (Studi di Desa Banjaranyar Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis).
- Prasetia, Y. S. (2017). Pendekatan Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI). *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 341-358.
- Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik melalui Mobile JKN di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 1-13.
- Rukmana, A. Y., Rahman, R., Afriyadi, H., Moeis, D., Setiawan, Z., Subchan, N., ... & Kusuma, A. T. A. P. (2023). *PENGANTAR SISTEM INFORMASI: Panduan Praktis Pengenalan Sistem Informasi & Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sanding, N. G., Lapian, M., & Kairupan, J. (2018). Penerapan Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis

Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.

Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92.

Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & Samputra, P. L. (2020). Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19 (A Narrative Policy Framework Analysis of Data Privacy Policy: A Case of Cyber Attacks During the Covid-19 Pandemic). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), 143-158.

TENTANG PENULIS

Penulis 1

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A



Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. merupakan dosen di Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang. Lahir di Jember pada tanggal 10 April 1995. Menempuh jenjang pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Jember pada tahun 2012-2016, dan melanjutkan studi S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2017-2019.

Sebelum masuk menjadi dosen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2021, Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. memiliki pengalaman sebagai auditor, peneliti dan juga sebagai dosen di Universitas Jember. Bidang yang diminati adalah inovasi dan digitalisasi akuntansi, manajemen investasi dan pasar modal, akuntansi keperilakuan, serta kewirausahaan. Pengalaman mengajar yang dimiliki antara lain: audit berbasis teknologi informasi, praktikum audit ACL, komputer akuntansi, teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi dan bisnis digital, studi kelayakan bisnis, dan masih banyak lagi. Pada saat ini memiliki banyak publikasi yang telah dipublikasikan antara lain: 3 buku, lebih dari 60 artikel penelitian dan pengabdian baik nasional dan internasional, dan juga lebih dari 180 HKI. Telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sehingga pada saat ini berhak memiliki tambahan gelar professional CBV, CAP, QWP, RSA dan RTA.

Penulis 2

Rifaldy Adinandra Ferdiansyah



Rifaldy Adinandra Ferdiansyah merupakan mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan FEB UM. Lahir di Madiun 10 September 2001. Penulis pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun dan hingga saat ini menempuh Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Sejak SMP penulis aktif mengikuti organisasi hingga sekarang penulis aktif mengikuti kegiatan di dalam dan di luar kampus antara lain Forum Mahasiswa Madiun Studi Malang (FORMADIMA) dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Penulis memiliki beberapa pengalaman sebagai Ketua Pelaksana dan Koordinator dalam kegiatan keorganisasian. Selain itu, penulis juga aktif dalam mengikuti kompetisi kemahasiswaan dan berhasil untuk meraih penghargaan sebagai pemenang dan finalis. Telah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi pada bidang pasar modal dan digital marketing.

Penulis 3 Tri Febrianti



Tri Febrianti dilahirkan di Kota Malang pada tanggal 13 Februari 2003. Penulis pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Bunulrejo 1 Kota Malang, SMP Negeri 21 Kota Malang, dan SMA Negeri 10 Kota Malang. Saat ini penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Negeri Malang. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi, diantaranya Lembaga Pecinta Bisnis pada tahun 2022 sebagai anggota divisi pengabdian masyarakat dan pada tahun 2023 sebagai kepala divisi pengabdian masyarakat serta bergabung dengan El Barka Bank Laboratorium Syariah sebagai bagian dari divisi *accounting*. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti kegiatan sukarelawan (*volunteer*) sebagai *social media specialist* di salah satu komunitas belajar. Bidang yang diminati oleh penulis adalah akuntansi, perpajakan, dan keuangan. Penulis telah mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi, yang mana hingga saat ini penulis telah memiliki sertifikasi teknisi akuntansi baik untuk klaster penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP ataupun pengoperasian aplikasi akuntansi berbasis komputer serta memiliki *Certified Accurate Professional (CAP)*.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023106463, 7 November 2023

Pencipta

Nama : **Tony Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A, Rifaldy Adinandra Ferdiansyah dkk**

Alamat : Dusun Curah Bamban RT 1 RW 27 Tanggul Wetan, Tanggul, Kota Jember 68155, Tanggul, Jember, Jawa Timur, 68155

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Tony Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A, Rifaldy Adinandra Ferdiansyah dkk**

Alamat : Dusun Curah Bamban RT 1 RW 27 Tanggul Wetan, Tanggul, Kota Jember 68155, Tanggul, Jember, Jawa Timur, 68155

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Tata Kelola Administrasi Desa: Langkah-Langkah Menuju Pemerintahan Yang Lebih Baik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 18 Oktober 2023, di Parbafingga

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000539418

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.